



NETRALITAS INDONESIA DALAM PERSAINGAN GLOBAL AS-TIONGKOK DI INDO-PASIFIK

Muh. Trizky Zulhijas

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Juni 2025

Revised: Juni 2025

Accepted: Juni 2025

Available online

Korespondensi: Email:

trizky@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah menjadi medan kontestasi kekuasaan global yang mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan regional. Indonesia, sebagai kekuatan menengah dengan posisi strategis di jalur pelayaran internasional, dihadapkan pada dilema kebijakan antara mempertahankan netralitas atau berpihak. Artikel ini menganalisis strategi Indonesia dalam merespons Persaingan tersebut melalui pendekatan teori Realisme dan Sekuritisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi hedging Indonesia mengandung peluang sekaligus risiko, terutama ketika tidak didukung oleh konsistensi kebijakan luar negeri dan penguatan kapabilitas nasional. Analisis juga menemukan

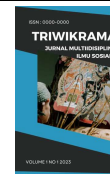
bahwa ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok berpotensi menimbulkan tekanan struktural, sebagaimana ditunjukkan oleh studi kasus di Sri Lanka dan Pakistan. Sedangkan, kurangnya sekuritisasi pada sektor teknologi menunjukkan kerentanan strategis baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian artikel ini merekomendasikan agar Indonesia membangun strategi multidimensi yang mengintegrasikan diplomasi aktif, kemandirian teknologi, dan ketahanan ekonomi sebagai bentuk respons proaktif terhadap Persaingan kekuatan besar.

Kata Kunci: Persaingan AS-Tiongkok, Indo-Pasifik, Strategi Indonesia, Realisme, Sekuritisasi, Hedging, Kedaulatan Teknologi

Abstract

The rivalry between the United States and China in the Indo-Pacific region has emerged as a global power contestation arena, shaping regional political, economic, and security dynamics. Indonesia, as a middle power with a strategic location along vital maritime routes, faces a policy dilemma between maintaining neutrality or aligning with one side. This article examines Indonesia's strategy in responding to this rivalry using the theoretical lenses of Realism and Securitization. The findings suggest that Indonesia's hedging strategy offers both opportunities and risks, especially when not supported by consistent foreign policy and strengthened national capabilities. The analysis also reveals that economic dependence on China poses structural vulnerabilities, as illustrated by case studies from Sri Lanka and Pakistan. Conversely, the lack of securitization in the technological sector exposes Indonesia to emerging strategic risks that remain under-addressed. This article recommends that Indonesia develop a multidimensional strategy that integrates active diplomacy, technological autonomy, and economic resilience as a proactive response to great power rivalry.

Keywords: US-China Rivalry, Indo-Pacific, Indonesia's Strategy, Realism, Securitization, Hedging, Technological Sovereignty



1. PENDAHULUAN

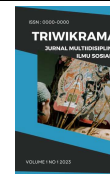
Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik saat ini tidak bisa dilepaskan dari persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara adidaya tersebut bersaing untuk memperluas pengaruh strategisnya melalui berbagai dimensi kekuatan: militer, ekonomi, teknologi, hingga diplomasi. Seiring berjalannya waktu, kawasan Indo-Pasifik tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga medan Persaingan kekuatan besar, menciptakan tekanan langsung maupun tidak langsung terhadap negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Latar belakang utama dari permasalahan ini bermula dari ambisi Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan pada 2013. BRI tidak hanya merupakan proyek pembangunan infrastruktur, tetapi juga instrumen geopolitik yang digunakan Tiongkok untuk membentuk keterikatan ekonomi dan politik dengan negara-negara mitra. Di Indonesia, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan pelabuhan di berbagai wilayah menjadi contoh nyata penetrasi ekonomi Tiongkok (Ibrahim et al., 2022). Terkait hal tersebut, Amerika Serikat menanggapi ekspansi Tiongkok dengan membentuk koalisi keamanan seperti QUAD dan AUKUS, serta memperkuat kehadiran militernya di kawasan.

Ketegangan antara kedua negara tidak hanya terlihat dari manuver militer di Laut Cina Selatan, tetapi juga melalui diplomasi simbolik dan tekanan struktural. Misalnya, hasil penelitian dari Zherlindya & Abdurrohim (2023) menunjukkan bagaimana Tiongkok berhasil mengalihkan dukungan diplomatik Kepulauan Solomon dari Taiwan ke Beijing, semata melalui kekuatan diplomasi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan lunak (*soft power*) Tiongkok dapat digunakan untuk menciptakan pengaruh strategis yang menggeser aliansi politik negara lain. Indikasinya, proyek-proyek ekonomi Tiongkok dapat mengandung konsekuensi geopolitik jangka panjang yang memengaruhi posisi diplomatik suatu negara (Mohammad Jafar Namdar Ardekani, 2022).

Lebih jauh lagi, Persaingan ini juga merambah ke sektor teknologi, Amerika Serikat menerapkan kebijakan protektif terhadap penguasaan teknologi kecerdasan buatan (AI). AS membatasi ekspor chip dan semikonduktor ke Tiongkok, melarang investasi AS ke sektor teknologi Tiongkok, serta membatasi kerja sama ilmiah dalam bidang teknologi sensitif (Adiwilaga et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi instrumen baru dalam perebutan kekuasaan global. Dalam hal ini, Indonesia berisiko menjadi arena kontestasi teknologi dan ekonomi digital jika tidak mampu mengembangkan sistem keamanan digital dan strategi teknologi yang independen (Mhlongo et al., 2023).

Di tengah Persaingan ini, posisi Indonesia menjadi sangat strategis sekaligus kompleks. Sebagai negara kepulauan terbesar yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan dan memiliki posisi vital dalam jalur pelayaran internasional, Indonesia tidak bisa bersikap pasif. Namun, komitmen terhadap politik luar negeri bebas-aktif menuntut Indonesia untuk bersikap netral dan tidak berpihak secara eksplisit. Masalah muncul ketika tekanan dari kedua belah pihak—baik berupa kerja sama ekonomi, tawaran investasi, maupun dinamika keamanan maritim—menuntut respons dan penyesuaian kebijakan luar negeri yang cermat (Zherlindya & Abdurrohim, 2023).

Tambahan kompleksitas muncul dari dimensi ekonomi-politik. Penelitian dari Amalia (2021) menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi pada salah satu pihak, dalam hal ini Tiongkok, dapat menciptakan tekanan politik terselubung. Hal ini relevan mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia dan salah satu investor terbesar di berbagai sektor strategis. Ketergantungan semacam ini dapat menciptakan dilema bagi Indonesia dalam



mempertahankan otonomi diplomatik dan kebijakan luar negeri, terutama ketika tekanan ekonomi digunakan sebagai alat negosiasi strategis.

Permasalahan inti yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana Indonesia dapat menjaga posisi netral dan berdaulat dalam menghadapi Persaingan kekuatan besar tanpa mengorbankan stabilitas domestik dan kepentingan jangka panjang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam mengelola tekanan geopolitik dan membingkai isu-isu keamanan dalam perspektif nasional. Proses analisis diarahkan pada dimensi kebijakan luar negeri, struktur ketergantungan ekonomi, keamanan maritim, dan dinamika teknologi sebagai bagian integral dari arena Persaingan global abad ke-21.

2. KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis respons Indonesia terhadap Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, artikel ini menggunakan dua teori utama dalam hubungan internasional, yaitu teori Realisme dan teori Sekuritisasi. Kedua teori ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap baik dimensi struktural sistem internasional maupun proses konstruksi ancaman dalam politik domestik dan kebijakan luar negeri.

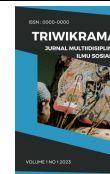
Teori Realisme, khususnya dalam varian neorealisme Kenneth Waltz, menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan negara bertindak sebagai aktor utama yang rasional dalam mengejar kepentingan nasional, terutama dalam mempertahankan keamanan dan kekuasaan. Dalam Indo-Pasifik, teori ini menjelaskan bagaimana Persaingan AS-Tiongkok mendorong negara-negara lain untuk mengambil sikap strategis berdasarkan logika keseimbangan kekuatan (*balance of power*). Indonesia, sebagai negara non-blok yang mengadopsi kebijakan luar negeri bebas-aktif, berada dalam posisi yang menuntut strategi pengimbangan yang hati-hati agar tidak terjebak dalam konflik terbuka atau ketergantungan pada salah satu pihak.

Teori Sekuritisasi yang dikembangkan oleh Copenhagen School (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998) memberikan perspektif tambahan dari kebijakan domestik dan bagaimana isu-isu internasional dibingkai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Menurut teori ini, suatu isu menjadi masalah keamanan bukan karena inheren bersifat mengancam, melainkan karena dikonstruksikan sedemikian rupa oleh aktor politik melalui tindakan wacana (*speech act*). Di Indonesia sendiri, isu seperti pelanggaran ZEE oleh kapal Tiongkok, dominasi ekonomi melalui BRI, atau ketergantungan teknologi, menjadi objek sekuritisasi oleh media, pemerintah, dan aktor kebijakan dalam negeri untuk mendorong respons kebijakan tertentu.

Teori Realisme menjelaskan mengapa negara seperti Indonesia perlu menjaga keseimbangan kekuatan secara strategis, sedangkan teori Sekuritisasi menjelaskan bagaimana isu-isu global dikaitkan dengan identitas, legitimasi, dan keamanan nasional.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan data ke dalam empat tema utama: (1) strategi keseimbangan kekuatan Indonesia, (2) ketergantungan ekonomi-politik, (3) pengaruh diplomasi simbolik, dan (4) sekuritisasi isu teknologi dan keamanan. Tema-tema tersebut dianalisis dalam kerangka teori realisme dan sekuritisasi untuk memahami strategi kebijakan luar negeri Indonesia di tengah Persaingan AS-Tiongkok.



4. ANALISIS

4.1. Strategi Keseimbangan Kekuatan dalam Persaingan AS-Tiongkok

Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik merupakan manifestasi dari kontestasi hegemoni global yang semakin intensif. Dalam logika neorealisme, sistem internasional yang anarkis mendorong negara-negara untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas melalui strategi penyeimbangan kekuatan (balancing) atau mengambil keuntungan melalui pendekatan bandwagoning (Waltz, 1979). Indonesia, sebagai kekuatan menengah (middle power), memilih jalur hedging untuk menghindari pemihakan ekstrem, yang secara prinsip sesuai dengan politik luar negeri bebas-aktif. Strategi ini tampak dalam kombinasi kerja sama ekonomi dengan Tiongkok dan hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Perbandingan dengan Vietnam dan Filipina mengungkap perbedaan hasil dari pendekatan serupa. Vietnam berhasil memodernisasi militernya sembari menjaga relasi ekonomi dengan Tiongkok dan secara aktif memperkuat kerja sama pertahanan dengan AS. Sementara Filipina di bawah Duterte pernah mengalami disorientasi kebijakan luar negeri yang ambivalen, sehingga memunculkan kebingungan strategis dan lemahnya posisi tawar di hadapan dua kekuatan besar. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi keseimbangan tidak cukup dengan deklarasi netralitas, tetapi memerlukan konsistensi dan kapasitas institusional yang kokoh.

Di Indonesia, keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemampuan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional secara tegas dalam forum internasional, sembari mengembangkan kapabilitas maritim dan diplomasi pertahanan yang kredibel. Tanpa langkah konkret, hedging akan menjadi bentuk pasif dari ketergantungan strategis, bukan strategi proaktif dalam menghadapi transformasi tatanan dunia multipolar (Setiadi, 2025).

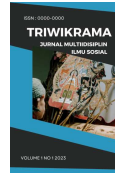
4.2. Ketergantungan Ekonomi dan Ancaman Struktural

Dominasi Tiongkok di sektor ekonomi kawasan menjadi tantangan serius bagi negara-negara yang rentan terhadap interdependensi struktural. BRI memang menawarkan peluang pembangunan infrastruktur, tetapi realitas geopolitik menunjukkan bahwa proyek ini sering dikaitkan dengan instrumen pengaruh politik jangka panjang. Amalia (2021) dalam penelitiannya menggarisbawahi bahwa relasi keuangan dapat dimanipulasi menjadi alat negosiasi dalam forum bilateral, sehingga negara penerima investasi perlu memiliki sistem mitigasi risiko ekonomi-politik yang kokoh.

Studi kasus Sri Lanka menjadi peringatan penting. Negara tersebut harus menyerahkan Pelabuhan Hambantota kepada Tiongkok setelah gagal membayar utang proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pinjaman Tiongkok. Hal serupa juga terjadi di Pakistan melalui proyek CPEC yang memicu ketegangan domestik. Sebaliknya, Malaysia di bawah Mahathir Mohamad berhasil melakukan renegosiasi terhadap proyek BRI, menurunkan beban utang dan menegaskan kedaulatan fiskal. Ketiga kasus ini memberikan pembelajaran penting bahwa intervensi ekonomi tidak netral secara politik, dan dapat menjadi alat pembentukan dominasi dalam skema relasi internasional yang timpang. Indonesia hingga kini belum menunjukkan tanda krisis ekonomi akibat proyek BRI, tetapi ketergantungan pada investasi Tiongkok di berbagai sektor, termasuk teknologi dan energi, menjadi alarm strategis.

4.3. Sekuritisasi Isu Keamanan dan Teknologi

Sekuritisasi isu Laut Natuna dan teknologi digital menjadi arena baru dalam pertarungan hegemoni global. Dalam perspektif teori Sekuritisasi, ancaman tidak bersifat objektif, tetapi dikonstruksi secara politis melalui tindakan wacana (speech act) oleh elit strategis. Indonesia secara reaktif menyekuritisasi isu pelanggaran ZEE oleh kapal Tiongkok, namun kurang menunjukkan konsistensi dalam membangun sistem pertahanan maritim yang memadai.



Sekuritisasi hanya terjadi ketika tekanan publik tinggi, bukan bagian dari perencanaan strategis nasional yang sistematis (Putri, 2019).

Pada dimensi teknologi, Amerika Serikat telah menyekuritisasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor melalui kebijakan pembatasan ekspor ke Tiongkok. Ini merupakan bentuk techno-containment yang menandai bahwa teknologi menjadi medan baru kontestasi kekuasaan. Dalam hal ini, Indonesia yang menjadi sasaran investasi digital harus sadar bahwa infrastruktur digital dan data nasional bukan sekadar sumber pertumbuhan, melainkan wilayah strategis yang dapat menentukan arah kedaulatan nasional ke depan (Setiadi, 2025).

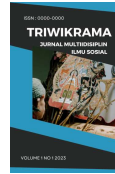
India telah memberi contoh bahwa kebijakan digital nasional bisa menjadi alat sekuritisasi yang efektif. Pemerintah India melarang aplikasi Tiongkok dan mengembangkan infrastruktur digital lokal sebagai bagian dari strategi keamanan. Jepang juga menerapkan regulasi ketat terhadap alih teknologi strategis. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang kuat untuk mengamankan data, teknologi AI, atau sistem jaringan digitalnya. Pada akhirnya, urgensi sekuritisasi sektor teknologi bukan sekadar perlindungan terhadap serangan siber, tetapi sebagai bagian dari strategi mempertahankan otonomi nasional dalam era digital.

5. KESIMPULAN

Persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik adalah kenyataan geopolitik yang tak terhindarkan dan semakin kompleks. Bagi Indonesia, tantangan utama bukan hanya bagaimana bersikap netral secara deklaratif, tetapi bagaimana memastikan bahwa netralitas itu disertai dengan strategi substantif yang berakar pada kepentingan nasional. Strategi keseimbangan kekuatan melalui pendekatan hedging dapat menjadi jalan tengah yang bijak, tetapi hanya akan berhasil jika diiringi konsistensi diplomasi, penguatan kapabilitas pertahanan, serta institusi kebijakan luar negeri yang tangguh dan otonom.

Ketergantungan ekonomi terhadap satu pihak, dalam hal ini Tiongkok melalui proyek BRI, harus dimitigasi dengan kebijakan diversifikasi dan transparansi yang ketat. Jika dibandingkan dengan Sri Lanka, Pakistan, dan Malaysia, kemampuan negosiasi yang cermat, proyek ekonomi dapat menjelma menjadi alat dominasi struktural. Dalam hal ini, Indonesia perlu mengembangkan political intelligence dan economic foresight agar tetap unggul dalam relasi asimetris. Negara-negara seperti India dan Jepang menunjukkan bahwa kemandirian teknologi dan kebijakan digital nasional adalah prasyarat untuk mempertahankan posisi strategis dalam sistem global.

Urgensi yang diangkat dalam tulisan ini bukan sekadar spekulasi, tetapi bersifat nyata dan struktural. Strategi Indonesia harus dipahami sebagai kebijakan multidimensi yang mengintegrasikan diplomasi, pertahanan, ekonomi, dan teknologi. Dalam menghadapi Persaingan AS-Tiongkok, Indonesia harus mengukuhkan dirinya sebagai aktor strategis yang tidak hanya bereaksi terhadap tekanan eksternal, tetapi mampu memproyeksikan kepentingan nasional secara aktif, terukur, dan berdaulat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Kusumah, P., & Mustofa, M. U. (2023). Implikasi Rivalitas Amerika Serikat - Republik Rakyat China Terhadap Posisi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan). *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 2(1), 29. <https://doi.org/10.24198/Aliansi.V2i1.44641>
- Amalia, Z. (2021). Pendekatan Strategis Dalam Persaingan: Interdependensi Finansial Amerika Serikat Dan Tiongkok. *Jurnal Sentris*, 2(1), 105-120. <https://doi.org/10.26593/Sentris.V2i1.4613.105-120>
- Mhlongo, S., Mbatha, K., Ramatsetse, B., & Dlamini, R. (2023). Challenges, Opportunities, And Prospects Of Adopting And Using Smart Digital Technologies In Learning Environments: An Iterative Review. *Heliyon*, 9(6), E16348. <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2023.E16348>
- Mohammad Jafar Namdar Ardekani, A. S. (2022). Determining The Development Rate Of Eleven Areas Of Shiraz City Using Morris Index And Scalogram. *Journal Of Research And Urban Planning*, 12(47), 1-24. <https://doi.org/10.30495/Jupm.2022.27821.3864>
- Putri, A. N. (2019). Japs 1. *Persaingan Pengaruh Di Pasifik Selatan: Pengalihan Dukungan Diplomatik Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke Tiongkok*, 3(2). <http://dx.doi.org/10.33541/Japs.V3i2.1294>
- Setiadi, K. S. (2025). *Journal Of Scientech Research And Development United States Strategy Facing Artificial Intelligence Technology*. 7(1), 449-463.
- Zherlindya, A. P. D., & Abdurrohman, M. (2023). Pertemuan 2+2 Indonesia-Australia 2023 Sebagai Respon Atas Rivalitas As-Tiongkok Di Kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*.